

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, R. (1986). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ahmad Gufron, dkk. (1991). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Melton Putra.
- Bagus Sarnawa, dkk. (2007). *Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Citra Prima Persada.
- Basyir, A. A. (1989). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Djatmika, S. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso, d. (1987). *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Bina Aksara Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. (1988). *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochammad Jasin, dkk. (2006). *Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, dkk. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nainggolan, H. (1983). *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Inaltu.
- Prakoso, D. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramulyo, M. I. (1986). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suganda, T. (1988). *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Triatmodjo, S. (1983). *Hukum Kepegawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wasman, H. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Teras.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61)

C. JURNAL

Arif Mulyono, "Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3, Nomor 1, (Maret, 2015)

H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya", *Musawa*, Vol.12, Nomor 2, (Juli, 2013)

Iqbal Pulungan, "Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol.1, Nomor 1, (Juni, 2011)

Nur Cholifah, dkk, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian", *Wacana Hukum*, Vol.9, Nomor 2, (Oktober, 2011)

Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak Atas Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Vol.17, Nomor 3, (Desember, 2015)

Siti Murni, dkk, "Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Isteri yang Dicerai (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda

Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, Nomor 2, (Agustus, 2014)

Tedi Sudrajat, “Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, Nomor 3, (September, 2008)

Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, Nomor 3, (September, 2010)

Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.26, Nomor 4, (Oktober, 2008)

M. Zainuddin, “Kajian Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami PNS yang Mentalak Isteri”, *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, Vol.5, Nomor 1, (2017)

D. Disertasi, Tesis, Skripsi

Nurul Syarifah Rahmawati, 2017, *Pelaksanaan Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Shinta Afriningtyas Putri W, 2010, *Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Siti Nurul Midayanti, 2012, *Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga*, (Skripsi Syari’ah, Ahwal Al-Syakhsiiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga).

E. Internet

Asep Zefhy, *Penyebab dan Dampak Perceraian*, <https://aink.web.id/faktor-penyebab-perceraian/>, diunduh pada hari Jumat, 10 November 2017, pukul 17.00 WIB.

Pelangi Blog, *11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga*, 02 Desember 2014, <https://www.pelangiBlog.com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian.html>, diunduh pada hari Jumat, 10 November 2017, pukul 17.05 WIB.

Wikipedia, *Pegawai Negeri*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri, diunduh pada hari Minggu, 12 November 2017, pukul 21.02 WIB.

Wikipedia, *Kota Tasikmalaya*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya, diunduh pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pukul 09.40 WIB.

Pemerintah Kota Tasikmalaya, *Data Pegawai*, <http://portal.tasikmalayakota.go.id/pemerintahan/data-pegawai/#1519843300853-73590722-0cce>, diunduh pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pukul 16.50 WIB.

Wikipedia, *Pengadilan Agama*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diunduh pada hari Minggu, 18 Maret 2018, pukul 22.21 WIB.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, *Sejarah Pengadilan*, 10 April 2017, <http://www.pa-tasikmalayakota.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diunduh pada hari Minggu, 18 Maret 2018, pukul 22.25 WIB.